



SIDAK: Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo meninjau TPA Pelangi Anak Negeri Yogyakarta, kemarin (29/4).

## Tuntutan Restitusi Menguat

Orang Tua:  
Anak Alami Trauma dan  
Tiga Kali Opname

**SLEMAN, Joglo Jogja** - Gelombang tuntutan keadilan dalam kasus dugaan kekerasan di Daycare Little Aresha terus menguat. Para orang tua korban kini tidak hanya mendorong proses pidana, tetapi juga menuntut restitusi atas kerugian materiil dan penderitaan psikis yang dialami anak-anak mereka.

Salah satu orang tua korban, Sukirman mengungkapkan bahwa tuntutan restitusi diajukan karena para wali murid telah membayar biaya penitipan yang tidak sedikit.



KUNJUNGI: Para orangtua anak korban Daycare Little Aresha menemui Wakil Ketua Komisi X DPR RI, My Esty Wijayati di kediamannya, Godean, kemarin (29/4).

■ Baca **TUNTUTAN...** Hal II

# Tuntutan Restitusi Menguat

sambungan dari hal Joglo Jogja

Disatu sisi justru berujung pada penderitaan anak.

"Pidana biar tetap berjalan, tapi restitusi juga kami minta. Kami menitipkan anak di situ berbayar, tidak sedikit. Anak kami sampai tiga kali opname, biaya rumah sakit juga tidak murah," jelasnya saat ditemui di kediaman Wakil Ketua Komisi X DPR RI My Esty Wijayati, kemarin (29/4).

Menurut Sukirman, hingga saat ini sudah ada 106 orang tua yang mengajukan tuntutan restitusi. Jumlah tersebut masih berpotensi bertambah seiring pendataan korban lain.

Sukirman menuturkan tuntutan restitusi memiliki alasan yang kuat. Ini karena anaknya mengalami kondisi kesehatan serius selama dititipkan di daycare tersebut.

Dalam kurun waktu kurang dari satu tahun, anaknya harus

menjalani rawat inap sebanyak tiga kali. Seluruhnya akibat dehidrasi, diare, dan muntah parah.

"Anak kami muntah sampai 18 kali sehari. Kami baru sadar ternyata di daycare itu anak kami ditelanjangi dan, diikat kakinya. Sangat tidak manusiawi," katanya.

Ia menjelaskan, anaknya pertama kali dititipkan saat usia 3 bulan. Pada usia 6 bulan, anaknya sempat dirawat di rumah sakit, kemudian kembali dititipkan setelah sempat dirawat di rumah. Namun kondisi serupa kembali terulang saat usia 11 bulan hingga harus dirujuk ke rumah sakit lain.

Tak hanya fisik, kondisi psikologis anak juga disebut sangat terganggu. Anak kerap terbangun di malam hari dan menangis histeris.

"Setiap malam tidak nyenyak, bahkan tidak sampai satu jam sudah terbangun dan teriak.

Pertumbuhannya juga terhambat, sampai usia satu tahun lebih belum bisa berjalan," ujarnya.

Dari sisi materiil, para orang tua mengaku mengeluarkan biaya penitipan yang bervariasi. Mulai dari Rp1,1 juta hingga Rp1,8 juta per bulan. Selain itu, mereka juga harus menanggung biaya pengobatan yang tidak sedikit.

Kerugian tersebut kini tengah dikalkulasi secara kolektif melalui kuasa hukum. Sekaligus berkonsultasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terkait mekanisme restitusi.

"Untuk psikis tidak terbatas, tapi materiil akan kami hitung, termasuk biaya pendidikan dan pengobatan," katanya.

Sukirman menegaskan, para orang tua berharap aparat penegak hukum bertindak tegas.

Untuk menjatuhkan hukuman maksimal kepada para pelaku.

"Ini kejahatan luar biasa, perbuatan biadab. Negara tidak boleh kalah oleh penjahat. Kami mohon ditegakkan keadilan seadil-adilnya," tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Maria Yohana Esti Wijayati menegaskan bahwa para orang tua memilikihak untuk mengajukan restitusi. Ini sesuai aturan yang berlaku, merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022.

Ia juga menyoroti lemahnya regulasi dan pengawasan terhadap daycare di Indonesia. Terutama yang belum memiliki izin resmi.

"Daycare ini belum diatur secara jelas dalam sistem pendidikan formal. Mestinya menjadi ranah perlindungan perempuan dan anak. Ini harus jadi evaluasi," ujarnya.

Esti menekankan pentingnya standar operasional prosedur (SOP). Termasuk rasio pengasuh,

kelayakan fasilitas, hingga pengawasan melalui CCTV.

Kasus ini, lanjut Esti, harus menjadi momentum evaluasi nasional terhadap seluruh tempat penitipan anak. Ia juga mendorong adanya regulasi yang lebih tegas dari pemerintah pusat.

"Untuk TK dan SD sudah diatur dalam Dikdasmen tapi kalau daycare ini sepertinya memang belum ada. Sehingga celah ini harus disikapi secara serius," katanya.

Selain itu, pemerintah daerah telah memberikan pendampingan psikologis bagi anak dan orang tua korban. Namun, ia menilai pemulihan akan membutuhkan waktu panjang mengingat beratnya trauma yang dialami.

"Ini bukan hanya soal hukum, tapi juga pemulihan anak-anak yang mengalami kekerasan fisik dan psikis," ujarnya. (dwi/bid/wa)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Walikota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan			

Yogyakarta, 17 Mei 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005